

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Lingkungan tersebut bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semua memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (Gedung sekolah dan sarana olahraga), perlengkapan, alat pendidikan materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara adalah memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Pada penelitian Tika Dwi Wahyuningsih (2016) yang berjudul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2015/2016 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif menyebutkan bahwa 90% responden guru 26 orang dan pegawai tata usaha 10 orang menyatakan bahwa prosedur pengelolaan dana bos di SMPN 2 Gombang telah sesuai dengan petunjuk teknis bos pada tahun 2015 dan hanya 10% responden 1 orang guru dan 3 orang tata usaha menyatakan tidak sesuai.

Proses manajemen dilakukan oleh instansi secara konsisten dan terus-menerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam

sekolah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 393 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah, pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengendalian fungsional.

Menurut Manullang (2017) menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu seni dan ilmu perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik pula, *stakeholder* yang dimaksud disini adalah pengelola keuangan dana BOS yang berada di sekolah tersebut. *Stakeholder* yang baik berupa pihak-pihak *internal* maupun *eksternal* sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan *stakeholder* akan menunjang uang yang optimal, seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang terutang dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang

pendanaan pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggung jawaban. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dalam realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah.

Minimnya fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana terutama sekolah yang berada dipedesaan maupun daerah terpencil seperti halnya fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Sitiung, hal ini bisa dilihat dengan kurangnya fasilitas kegiatan belajar mengajar, gedung kelas yang kurang, sanitasi yang tidak memadai, perpustakaan dan bangku sekolah yang rusak maupun tidak mencukupi. Padahal pemenuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan.

Fasilitas sekolah atau sarana prasarana adalah salah satu sumber daya menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting yang perlu

disiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga kedepannya proses belajar mengajar bisa terlaksana secara optimal khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Sitiung. Penggunaan prinsip keadilan yang dimaksud ketika menyusun RAPBS dan prinsip efisiensi ketika diterapkan secara eksternal dalam manfaat yang diterima serta biaya yang dikeluarkan oleh siswa apabila siswa bersekolah. Dana BOS yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah, karena dengan adanya dana BOS menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah berdasarkan sistem pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan masing-masing sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII. Berdasarkan latar belakang masalah, pada SMA Negeri 1 Sitiung terdapat beberapa kekurangan yang di tinjau peneliti seperti masih kurangnya alat-alat praktik pada labolaturium kimia, kurangnya buku pada perpustakaan, dan peneliti meninjau dari web <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/> pada halaman data sekolah kita SMA Negeri 1 Sitiung ini terdapat 22 ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan, 2 ruang kelas dengan kerusakan sedang, 4 ruang kelas dengan kerusakan berat, pada laboraturium IPA mengalami 1 ruangan yang kerusakan ringan dan 2 rungan dengan kerusakan sedang, pada labor komputer terdapat 2 ruangan yang mengalami kerusakan berat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Sitiung digunakan penyediaan biaya operasi non operasionalia bagi satuan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Sitiung sebagai program wajib belajar. Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) digunakan sesuai dengan petunjuk atau juknis

tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada ruang lingkup UPT SMA Negeri 1 Sitiung. Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) digunakan sesuai dengan petunjuk atau juknis tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada ruang lingkup UPT SMA Negeri 1 Sitiung. Tujuan dari penggunaan 6 dana BOS di UPT SMA Negeri 1 Sitiung membantu menyediakan pendanaan biaya operasi non peronila sekolah yang masih dapat di bayarkan dari dana BOS, membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “ANGGARAN DAN REALISASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DI SMA NEGERI 1 SITIUNG”

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kajian teori maupun hasil penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: Bagaimana realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Sitiung?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui realisasi anggaran dana BOS dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pelaporan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Sitiung.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu ekonomi dalam kajian teoritis bagi akademisi terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Sitiung.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Sekolah**

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengelolaan keuangan sekolah.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah.